

### BAB III

#### ***INTERFAITH DIALOGUE* DALAM DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA 2004-2006**

Seperti telah diuraikan di bab sebelumnya, semenjak terjadinya peristiwa 11 September 2001, Bom Bali 1 & 2, dan juga pemboman di hotel JW Marriot, para wisatawan asing mendapat "*travel warning*" dari negara-negara asalnya, mereka untuk sementara tidak diperbolehkan untuk melakukan wisata ke Indonesia, dikarenakan adanya mosi tidak percaya terhadap negara Indonesia. Negara Indonesia yang terkenal dengan keanekaragaman budaya dan agama, mencoba menarik simpati publik dengan cara diplomasi publik. Yaitu dengan cara menyelenggarakan *interfaith dialogue*. Beberapa negara baik dari ASIA maupun dari Eropa ikut ambil bagian dalam terselenggaranya *interfaith dialogue* ini, juga termasuk negara Australia.

#### **A. Latar Belakang Penyelenggaraan *Interfaith Dialogue*.**

##### **1. Definisi dan Sejarah *Interfaith Dialogue*.**

*Interfaith dialogue* secara harfiah berarti dialog lintas kepercayaan. Masih belum ada literatur yang menefinisikan frase ini secara terminologis, sehingga definisi operasional dari variabel ini masih mengacu pada makna harfiah seperti diterjemahkan oleh Echols (1990). Di sini kita mencatat bahwa istilah yang digunakan

oleh Departemen Luar Negeri pada kegiatan tersebut adalah *faith*, yang memiliki dua makna: kepercayaan serta agama, keyakinan.<sup>23</sup>

*Interfaith dialogue*, sebagai wujud dari diplomasi publik RI merupakan salah satu *track* dari *multy track diplomacy*, yaitu *track seven* atau *peacemaking through faith in action*. Tujuan penting dari *track* ini adalah mencapai perdamaian melalui aktivitas keagamaan, baik secara intrareligi ataupun interreligi. (Diamond, 1996: 97) menyatakan:

*"The religious community seeks to bring the moral laws and spiritual truths of God and the universe to the practical establishment of peace on earth. Religious groups of diverse persuasions believe that they naturally belong on the forefront of work for peace and justice, understanding and reconciliation, because, in their belief systems, these issues are at the heart of humanity's spiritual evolution"*<sup>24</sup>  
(Diamond, 1996: 97)

Pluralisme agama merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari adanya dan setiap agamamuncul dalam lingkungan yang plural. Jika pluralisme agama tersebut tidak disikapi secara tepat, maka akan menimbulkan konflik atau masalah antar umat beragama, dan kenyataan ini telah terjadi pada agama-agama monotheis. Untuk mencari solusi konflik antar umat beragama perlu adanya pendekatan yang tepat.

<sup>23</sup> Echols, John M. and Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Ithaca, N.Y: Cornell University Press.

<sup>24</sup> Diamond, Louise and John McDonald, *Multy-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*.

Sejarah *Interfaith Dialogue* di Indonesia sendiri berangkat dari perkembangan situasi umat beragama di Indonesia pada masa kolonial yang tidak menguntungkan, maka pada tanggal 30 Nopember 1967 diadakan "Dialog Dari Atas" yang dipelopori oleh pemerintah melalui Menteri Agama, KH. Muhammad Dahlan. Tetapi dialog yang melahirkan wadah "Musyawarah Antar Agama" itu belum dianggap berhasil menyelesaikan konflik antar agama.

Sampai pada periode berikutnya, dialog itu menemukan kembali momentum barunya pada masa Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama yang mencoba merumuskan dialog dengan berpijak pada iktikad baik dan sikap saling percaya dari masing-masing komunitas agama. Dan karena itu, Mukti Ali menghidupkan kembali wadah "Musyawarah Antar Agama" dengan melibatkan lebih banyak tokoh dan pemimpin agama.

Sebenarnya sejak awal Orde Baru hingga sekarang, baik atas prakarsa pemerintah maupun masyarakat beragama itu sendiri, dialog antar umat beragama telah dibangun, bahkan menjadi agenda nasional demi terciptanya stabilitas keamanan serta lancarnya pembangunan meskipun kemudian ada pihak yang

menilai tidak berhasil, karena tidak adanya kesepakatan bersama berkenaan dengan prinsip-prinsip penyebaran agama.<sup>25</sup>

Bahkan masa antara tahun 1972-1977 tercatat pemerintah telah menyelenggarakan dialog yang berlangsung di 21 kota. Pada dekade tahun 1980-an hingga saat ini prakarsa dialog dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama dan sosialisasi pemahaman pluralisme ini pun terus dilakukan, baik oleh tokoh agama, intelektual muda maupun pemerintah sendiri, misalnya dialog yang diselenggarakan oleh International on Religion and Peace (ICRP) yang diprakarsai oleh Johan Efendi dan kawan-kawan, dialog kelembagaan (*Institutional Dialogue*), yakni dialog antar delegasi berbagai organisasi agama yang melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konfrensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI), dll. Dialog berwacana transformatif yang sering dilakukan oleh kalangan intelektual atau LSM seperti Interfidei, Paramadina, LkiS, LP3M, MAIDA dan lain-lain.

---

<sup>25</sup> Sumarthana, "Memuju Dialog Antar Iman", Pengantar dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama Dian/Interfedei. Seri Dian I/Tahun I. Yogyakarta, 1993

## 2. Dialog Sebagai Bentuk Diplomasi Publik.

Abad 21 adalah awal perubahan yang mendasar yang terkait pada teknologi dan informasi, perubahan-perubahan tersebut memberi pengaruh bagi aktivitas diplomatik. Seperti yang dikatakan oleh Harold Nicholson bahwa dengan adanya perkembangan diplomasi, maka peran dan fungsi diplomat telah berkurang peran dan fungsinya. Tetapi menurut kenyataannya informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang amat penting yang dibutuhkan dalam dunia diplomatik, kemajuan teknologi dan informasi tidak pantas dikatakan memberikan pengaruh buruk pada bagaimana diplomasi itu dijalankan. Kemajuan informasi dan teknologi tentu saja membawa dampak baik dalam dunia hubungan Internasional seperti contohnya: meningkatnya peran media massa dan meningkatnya partisipasi masyarakat untuk lebih mengetahui tentang apa yang terjadi di belahan dunia luar serta berkembangnya model-model diplomasi seperti lahirnya diplomasi publik.<sup>26</sup>

Diplomasi publik memberi warna baru pada dunia diplomatik. Perlu ditekankan disini diplomasi publik bukan semata-mata digunakan untuk menggantikan diplomasi jalur pertama (*first track diplomacy*) yang diwakili oleh aktor-aktor pemerintah, tetapi diplomasi publik berfungsi sebagai pelengkap upaya-upaya yang

<sup>26</sup> "Tren Diplomasi Abad 21" <http://diplomasisenin1245.blogspot.com/2010/06/tren-diplomasi-abad-21-dini-eka.html>. diakses tanggal 26 Maret 2011.

dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah, serta berusaha untuk memberikan masukan melalui informasi-informasi penting, membuka jalan negosiasi antar pemerintah dan memberikan cara pandang baru terhadap upaya-upaya penyelesaian konflik-konflik yang terjadi.

Diplomasi publik juga bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif terhadap isu-isu global yang berkembang, melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan, maka jelas diplomasi publik disini mengutamakan komunikasi Internasional. Secara sederhana cara kerja diplomasi publik melibatkan 9 jalur, yaitu: 1. Jalur pertama atau pemerintah, 2. Kelompok NGO/juru damai melalui resolusi konflik, 3. Kelompok bisnis atau juru damai melalui kegiatan ekonomi atau perdagangan, 4. Warga negara atau juru damai perorangan biasa, 5. Aktivitas penelitian, pelatihan, pendidikan, atau perdamaian melalui pembelajaran, 6. Aktivisme, atau juru damai melalui advokasi, 7. Kelompok agama, atau juru damai melalui penebalan iman, 8. Perdamaian melalui penyediaan dana, 9. Komunikasi dan media.<sup>27</sup>

Deplu AS menyatakan: *"Public diplomacy seek to promote the national interest and the national security of the united states through understanding, informing and influencing"*

<sup>27</sup> "Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik dan Internasional"  
<http://tabloiddiplomasi.com/index.php/previous-issue/55-desember-2007/535-diplomasi-mublik-meniembatani-persepsi-domestik-dan-internasional.html> diakses tanggal 26 Maret

*foreign publics and broadening dialogue between American citizens and institutions and their counterparts abroad.*

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirrajuda mengatakan bahwa diplomasi publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain.

Harus disadari bahwa upaya represif untuk menangani aksi terorisme telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun sejalan dengan itu, upaya pencegahan terhadap aksi terorisme harus menjadi prioritas. Seiring dengan semakin mengglobalnya hubungan antar negara-negara, maka Indonesia amat membutuhkan kerjasama dari negara-negara lain untuk menanggulangi terorisme. Usaha Indonesia dalam mendapatkan dukungan dari negara-negara lain adalah dengan menggunakan upaya *soft power*. Upaya diplomasi *soft power* Indonesia salah satunya diwujudkan dengan mengadakan agenda *interfaith dialogue* yang diselenggarakan oleh Direktorat Diplomasi Publik RI.

*Interfaith Dialogue* ini merupakan sebuah penerapan diplomasi publik, dimana suatu dialog dimanfaatkan menjadi sebuah alat diplomasi. Dimana *Interfaith dialogue* memiliki posisi yang cukup penting dalam agenda *multytrack diplomacy*. Dengan adanya *interfaith dialogue* potensi kesalahpahaman antarnumat

beragama dapat dikurangi. *Interfaith dialogue* juga akan memiliki manfaat yang berupa munculnya *transformational politics* yang berfungsi menjaga kesadaran masyarakat atas pentingnya perdamaian.<sup>28</sup>

### 3. Tujuan dan Sasaran *Interfaith Dialogue*.

*Interfaith Dialogue* merupakan sebuah bentuk dialog lintas agama dan keyakinan yang berkomitmen untuk membangun keharmonisan diantara agama-agama dan keyakinan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan keinginan Indonesia untuk memberdayakan kaum moderat dan membangun saling pengertian antar agama dan kebudayaan untuk mencegah semakin meluasnya terorisme serta mencapai kesepakatan atas dasar pengertian yang saling menguntungkan. Sehubungan dengan upaya pemulihan citra Indonesia di dunia Internasional, maka tujuan dan sasaran dari *Interfaith Dialogue* tersebut antara lain:

#### a. Tujuan dialog adalah:

1. Memberi penjelasan tentang hakikat ajaran agama Islam yang menghormati harkat dan martabat manusia.
2. Merubah *stereotype* di kalangan Barat tentang Islam di Indonesia.

<sup>28</sup> Diamond, Louise and John McDonald. *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*



3. Meningkatkan kerjasama dalam bidang poleksosbudhankam.
4. Menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Barat tentang situasi di Indonesia sehingga mereka dapat melakukan kegiatan dengan normal.
5. Memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, terutama dalam kehidupan beragama.

b. Sasaran dialog adalah:

1. Merubah *stereotype* di kalangan masyarakat Barat agar tidak mengidentikkan Islam dengan kekerasan atau terorisme.
2. Diharapkan peserta dialog dapat berfikir secara netral dalam menilai peristiwa-peristiwa terorisme dan tidak mengkaitkannya dengan agama Islam atau pemeluknya.
3. Saling memahami dan menghormati antar umat beragama.
4. Para peserta asing diharapkan dapat menjadi komunikator efektif yang menjelaskan kepada dunia luar, khususnya di kalangan masyarakat AS, tentang kondisi riil kehidupan beragama di Indonesia.
5. Para peserta dari Indonesia dapat menjadi komunikator efektif yang dapat menjelaskan kepada konstituen domestik tentang nilai-nilai sosial dan budaya Barat

## B. Penyelenggaraan *Interfaith Dialogue* Tahun 2004-2006.

Perubahan politik internasional pada awal dekade 1990-an telah mengakibatkan perubahan pada tren politik luar negeri dan diplomasi di dunia. Diplomasi yang pada awalnya hanya berada satu jalur (*track*), yaitu diplomasi di meja perundingan, atau disebut juga sebagai diplomasi tradisional yaitu diplomasi yang menyangkut satu pemerintah negara dengan pemerintah dari negara lainnya secara *official* telah berkembang menjadi banyak jalur.<sup>29</sup> Negara kini tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam hubungan internasional. Muncul banyak aktor transnasional lain yang tidak membawa *platform* negara sehingga diplomasi tidak hanya dijalankan dari negara ke negara, tetapi juga non-negara ke non-negara.

Sejalan dengan hal tersebut, banyak negara yang mulai mengubah pendekatannya dalam hubungan internasional. Negara kini mulai merangkul konstituen diplomasi (aktor-aktor transnasional dan warga negara) dengan sebuah pendekatan baru: diplomasi publik. Mode diplomasi ini tidak lagi berkuat pada negosiasi dan forum-forum internasional, tetapi lebih ekstensif merangkul konstituen diplomasi dengan kampanye dan propaganda untuk membentuk citra positif bagi negaranya.

Diplomasi publik merupakan sebuah instrumen politik luar negeri yang relatif baru dilaksanakan di Indonesia. Dalam struktur organisasi Departemen Luar Negeri RI, diplomasi publik dijalankan oleh Sub-Direktorat Diplomasi

Publik pada Direktorat Jendral Informasi dan Diplomasi Publik. Direktorat ini dibentuk pada tahun 2002 dengan Direktur pertama Yohanes Kristiarto Legowo.<sup>30</sup>

Seperti sudah diuraikan di bab 1, bahwa pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Diplomasi Publik RI menyelenggarakan kegiatan *interfaith dialogue* sebagai langkah dalam melaksanakan diplomasi publik dengan beberapa negara.

Agenda *interfaith dialogue* dalam diplomasi publik RI di tahun 2004 diawali dengan kegiatan *International Conference of Islamic Scholars (ICIS) I* pada tanggal 23-25 Februari 2004 di Jakarta. Menarik untuk dicermati bahwa kegiatan ini, meskipun pada awalnya adalah konferensi ulama muslim yang diprakarsai oleh Nahdhatul Ulama (PBNU), pada perkembangannya justru menjadi cikal bakal dialog antarkepercayaan. Hal ini tercermin dari hasil konferensi, yaitu *Jakarta Declaration 2004* pada poin ketiga, keempat, dan kelima. Hasil tersebut antara lain menyatakan bahwa, perbedaan antar individu, kebudayaan dan peradaban adalah sebuah berkat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Selain itu juga menegaskan bahwa islam itu mengajarkan untuk menjunjung tinggi harga diri manusia dan mengakui kesempatan yang sama antar manusia dalam hubungan antar pribadi, demi menjaga keharmonisan hubungan antar kepercayaan dan juga dalam seluruh proses pengambilan keputusan Internasional. Dan juga sepenuhnya mendukung usaha untuk meningkatkan

<sup>30</sup> Departemen Luar Negeri RI, *Susunan Pejabat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia*, [http://www.depnu.go.id/?category\\_id=103](http://www.depnu.go.id/?category_id=103), diakses tanggal 12 Januari 2011.

konstruksi dan interaksi dialog untuk meningkatkan pengertian bersama dan hormat antara pengikut seluruh umat beragama dan negara.

Jakarta Declaration tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh para menteri luar negeri ASEAN pada salah satu poin dari *chairman's statement* pada 11<sup>th</sup> *Meeting of ASEAN Regional Forum* di Jakarta, Juli 2004 yang menyambut baik hasil *International Conference of Islamic Scholars*. Kemudian, pada Desember 2004, muncullah kegiatan *Dialogue on Interfaith Cooperation* di Yogyakarta, 6-7 Desember 2004. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara Departemen Luar Negeri RI, PP Muhammadiyah, dan *Department of Foreign Affairs and Trade* Australia.<sup>31</sup>

Patut untuk dicermati bahwa peran Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia sangat besar dalam mewujudkan terjadinya dialog antarkepercayaan ini. Kedua organisasi ini terlibat sebagai *sponsor* dari dua kegiatan di atas. Keterlibatan ini menjadi sebuah hal yang menarik karena ternyata *spirit* dan usaha untuk mempertemukan tokoh lintas kepercayaan juga dimiliki oleh masyarakat Islam.

Pada tahun 2005, muncul tiga kegiatan *interfaith dialogue* sebagai *follow-up* dari *Dialogue on Interfaith Conference*. Tiga kegiatan tersebut antara lain kegiatan *Bali (Asia-Europe Meeting) Interfaith Dialogue* di Bali, 21-22 Juli 2005 dan paket kegiatan *Interfaith Dialogue "Islam in Pluralistic Society* di Vatikan,

<sup>31</sup> Departemen Luar Negeri RI, *Indonesia-Australia bekerjasama dengan Muhammadiyah menyelenggarakan suatu Dialog mengenai Kerjasama Lintas Agama (Siaran Pers)*, [http://www.depku.go.id/?language=id&press\\_id=66&](http://www.depku.go.id/?language=id&press_id=66&).

30 September 2005 serta Melbourne, 27-30 September 2005. Tiga kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari wacana-wacana berkembang mengenai perlunya dialog antarkepercayaan.

Sayangnya, bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan dialog tersebut, muncul insiden yang sangat berbau sentimen agama dari Koran Jyllands-Posten di Denmark yang memuat 12 karikatur tentang Nabi Muhammad SAW. Pemuatan karikatur tersebut menimbulkan kontroversi, ketegangan, dan kutukan dari umat Islam di berbagai belahan dunia karena menyangkut persoalan yang sangat substansial dan sakral bagi pemeluk agama Islam. Insiden ini jelas menjadi sebuah penghambat besar dalam upaya pelaksanaan dialog antarkepercayaan yang telah dicanangkan.

Upaya untuk membuka dialog secara lebih intensif kembali dilakukan pada tahun 2006. Pada tanggal 28 Februari dan 1 Maret 2006, Deplu RI dan Kementerian Luar Negeri Belanda, didukung oleh sejumlah NGO di Belanda, mengadakan kegiatan bertajuk *The Indonesia-Netherlands Interfaith Dialogue "Peaceful Coexistence and Interfaith Cooperation"*. Kegiatan yang dilaksanakan di Den Haag ini diikuti oleh sekitar 200 akademisi, rohaniawan, dan aktivis keagamaan. Indonesia diwakili oleh FT. Ignatius Ismartono (Konferensi Waligereja Indonesia), I Nyoman Suwandha (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Dien Syamsuddin (PP Muhammadiyah), Muhammad Ali (UIN Syarif Hidayatullah), dan Thamrin Amal Tomagola (EISIP-IID).

Agenda berikutnya adalah *Cebu Dialogue on Regional Interfaith Cooperation for Peace, Development, and Human Dignity* yang dilaksanakan di Cebu, Filipina, 14-16 Maret 2006. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Philippines Department of Foreign Affairs* atas dukungan dari Departemen Luar Negeri RI. Menarik untuk dicermati bahwa forum ini merupakan sebuah forum regional yang memiliki implikasi luas, karena dihadiri oleh perwakilan negara Asia-Pasifik yang cukup plural. Sebelum pelaksanaan dialog, Deplu menyelenggarakan *Foreign Policy Breakfast* dengan para tokoh agama dari Indonesia yang mengikuti kegiatan tersebut.<sup>32</sup>

Kegiatan yang dibuka oleh Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo tersebut dihadiri oleh perwakilan negara-negara di Asia Pasifik dengan total 175 peserta. Dialog antarkepercayaan tersebut menghasilkan *Cebu Declaration* yang secara substansial menekankan pentingnya *interfaith dialogue* dalam proses perdamaian dunia. Dr. Alberto G. Romullo, *Secretary of Foreign Affairs of Philippines* juga menegaskan hal serupa dalam *Press Release* yang dikeluarkan oleh *Philippines Department of Foreign Affairs* mengenai *Cebu Declaration* ini.<sup>33</sup>

Agenda berikutnya di tahun 2006 adalah *2<sup>nd</sup> International Conference of Islamic Scholars* di Jakarta, 20-22 Juni 2006. Meskipun kegiatan ini adalah konferensi ulama-ulama muslim sedunia, kita patut mencatat bahwa perhatian penganut agama lain terhadap konferensi ulama-ulama sedunia ini cukup besar.

<sup>32</sup> Departemen Luar Negeri RI, *Cebu Dialogue on Regional Interfaith Cooperation for Peace, Development and Human Dignity*, tanggal 14-16 Maret 2006 di Cebu, Filipina. (Siaran Pers), [http://www.deplu.go.id/?language=id&category\\_id=127&news\\_id=107&main\\_id=105&](http://www.deplu.go.id/?language=id&category_id=127&news_id=107&main_id=105&)

<sup>33</sup> Philippines Department of Foreign Affairs, *Press Release (PS037-AGR-036): Building The Momentum For Peace*, lihat di <http://www.dfa.gov.ph/>

Terbukti, pihak Tahta Suci Vatikan (*Vatican Holy See*) mengirimkan Mgr. Khalid Al-Akasheh yang menyampaikan paparan kunci (*keynote speech*) pada pembukaan konferensi. Hasil dari ICIS II ini kemudian disepakati untuk dijadikan sebagai bahan presentasi di *Tripartite Forum on High Level Conference on Interfaith Cooperation for Peace*.

Setelah ICIS II, agenda *interfaith dialogue* yang didukung oleh Departemen Luar Negeri RI ini adalah *World Peace Forum* yang diselenggarakan di Jakarta, 14-16 Agustus 2006. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah dan *Multi Culture Society* dan mengangkat tema "*One Humanity, One Destiny, One Responsibility*". Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh lintas agama dan lintas kebudayaan yang difasilitasi oleh Deplu RI.

*World Peace Forum* kemudian mengantarkan agenda dialog antarkepercayaan berikutnya, yaitu *Global Intermedia Dialogue* di Bali, 1-2 September 2006. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Departemen Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Norwegia. Kegiatan ini cukup mendapat respons publik internasional karena mengambil momentum kebebasan pers di tengah kontroversi karikatur Nabi Muhammad yang menyulut kemarahan umat Islam. *Global Intermedia Dialogue* ini diikuti oleh 73 tokoh jurnalistik dari 44 negara, dan diliput oleh 77 wartawan nasional serta 20 kantor berita asing.

Dialog ini disebut oleh Djalal sebagai cermin dari diplomasi yang inovatif. Hal menarik dalam *Global Intermedia Dialogue* ini adalah pemilihan Norwegia sebagai *partner nation* dalam penyelenggaraan dialog. Posisi Norwegia yang

secara geopolitik dekat dengan Denmark di Skandinavia (negara tempat karikatur beredar) dapat menimbulkan dilema. Maka, penempatan Bali sebagai tempat penyelenggaraan dialog dan peran serta pemerintah Norwegia juga merupakan sebuah terobosan baru dalam diplomasi Indonesia.

Agenda *interfaith dialogue* terakhir yang sangat penting –bahkan dapat dikatakan sebagai puncak agenda— di tahun 2006 adalah kegiatan *Tripartite Forum on High-Level Conference on Interfaith Cooperation for Peace* yang dilaksanakan oleh PBB di New York, 21 September 2006. Pada forum ini, KH. Hasyim Muzadi, Ketua PBNU mendapat kehormatan untuk menyampaikan presentasi berjudul “*Moderation as the Pillar of a Peaceful and Harmonious Multi-Cultural and Multi-Faith Society: the Indonesian Experience*” dalam kapasitas beliau sebagai Sekretaris Jenderal *International Conference of Islamic Scholars*.

Kehadiran serta keterlibatan aktif Indonesia di forum ini sejalan dengan salah satu kebijakan dari politik luar negeri RI, yaitu menggalang dukungan masyarakat internasional terhadap pentingnya multilateralisme dan mengoptimalkan peran aktif Indonesia dalam forum regional serta multilateral. Adanya *interfaith dialogue* akan membuka jalan bagi peningkatan *bargaining position* Indonesia di dunia diplomasi, khususnya PBB. Namun, ukuran kontinuitas dari *interfaith dialogue* ini juga masih harus dibuktikan karena memerlukan *political will* dari pemerintah untuk tetap melaksanakan agenda secara *sustainable* dan konsisten.